



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERIYADI WASITO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **757421**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.415.000.000**

1. Tanah Seluas 584 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 2225 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 781 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 3690 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **118.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **2.800.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **23.683.816**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.559.483.816**

III. HUTANG Rp. **48.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.511.483.816**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.